

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menghendaki demokrasi sebagai landasan dari sistem politiknya. Hal tersebut tercermin melalui Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implikasi dari peraturan yang termuat dalam konstitusi tersebut, membuat Indonesia menjadi negara yang menjunjung kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Budiardjo (2008, hlm. 106) menjelaskan lebih khusus mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menurutnya di Indonesia, demokrasi memiliki suatu ciri khusus yaitu demokrasi dengan corak khas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun, dalam pelaksanaannya Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Nasution (dalam Agustamsyah, 2011, hlm. 82) mengungkapkan bahwa dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau dengan melalui persetujuan rakyat.

Pelaksanaan demokrasi melalui pengorganisasian negara dengan keterlibatan rakyat secara langsung membawa Indonesia pada kondisi politik yang sangat beragam. Kondisi demikian merupakan akibat dari beragamnya pula kondisi sosial yang ada pada masyarakat di Indonesia. Sistem sosial masyarakat di Indonesia yang majemuk dalam segi suku, agama, ras, dan aliran politik menyebabkan keanekaragaman budaya dan politik yang semakin tinggi. Salah satu implikasi dari keanekaragaman politik ialah dengan munculnya sistem multi partai yang ada di Indonesia yang dilaksanakan pada era reformasi hingga saat ini. Arman (2018, hlm. 28) mengungkapkan sistem multi partai ialah sistem politik dalam negara dengan bentuk kepartaian yang didalamnya terdapat partai politik lebih dari dua dan tidak ada partai yang memegang mayoritas mutlak.

Sistem multi partai memunculkan berbagai persepsi dan ideologi politik yang heterogen. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya kelompok partai politik dari berbagai aliran politik didalamnya sejak awal era reformasi hingga saat ini.

Kondisi sebagaimana dimaksud merupakan indikasi dari berkembangnya kehidupan politik yang semakin demokratis. Proses demokratisasi tersebut semakin meningkat dengan munculnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang didalamnya mengatur perubahan bahwa pembubaran partai politik yang awalnya menjadi wewenang pemerintah dialihkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memberikan ruang bagi kemunculan partai politik dengan persepsi dan ideologi politik yang heterogen.

Dalam perkembangannya, sistem multi partai memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan dari sistem multi partai ialah pelaksanaan demokrasi yang membuka inspirasi rakyat untuk membentuk partai politik dan membuat rakyat bisa bebas menyuarakan gagasannya, sehingga menimbulkan gerakan oposisi terhadap pemerintahan untuk menciptakan iklim politik yang berimbang. Kelemahan sistem multi partai, diantaranya memunculkan suatu persaingan politik yang tidak sehat, saling menjatuhkan antar partai politik, timbul banyak partai dalam arti yang tidak sehat, dan dapat berakibat pada perpecahan antar partai politik (Arman, 2018, hlm. 28). Walaupun demikian, pada konteks kondisi politik di Negara Indonesia, sistem multi partai menghantarkan pendirian partai politik dan aliran politik yang baru.

Salah satu partai politik baru yang muncul setelah era reformasi adalah Partai Keadilan (PK) yang menjadi cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan adalah partai berasaskan islam. Pendirian partai ini lahir dari pertumbuhan dakwah pada agama islam. Pendirian Partai Keadilan dilatar belakangi oleh adanya kesamaan sikap diantara sebagian besar kalangan aktivis dakwah yang menyatakan pada tahun tersebut adalah momen yang sangat tepat untuk meneguhkan posisi dakwah dalam bentuk aktivitas kepartaian. Irsyad (2010, hlm. 35) menjelaskan, Partai Keadilan adalah partai yang lahir dari perjalanan politik Islam di Indonesia yang panjang, bahkan sejak masa awal kemerdekaan hingga dengan mengganasnya pemerintahan orde baru yang menimbulkan berbagai perlawanan rakyat.

Pada perkembangannya, partai ini terlibat dalam pemilihan umum pada tahun 1999. Pada tahun tersebut, Partai Keadilan tidak mencapai ketentuan *electoral threshold*. Sebagai langkah untuk dapat mempertahankan posisinya, lahir sebuah partai baru bernama Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat dengan nama PKS.

Pendirian PKS secara umum adalah melanjutkan misi politik pada partai keadilan tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* yang dilaksanakan dalam pemilihan umum pada tahun 1999, sehingga tidak bisa melanjutkan aktivitas politik sebagai partai. Pendirian Partai Keadilan Sejahtera berorientasi pada ajaran islam untuk mencapai suatu tujuan dakwah Islam melalui cara-cara demokratis. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang dibentuk oleh sejumlah aktivis muslim di Indonesia. Secara umum, pendiri Partai Keadilan Sejahtera berasal dari mantan akitivis mahasiswa pada universitas ternama di Indonesia yang melakukan pergerakan dakwah kampus.

Berdasarkan kajian historis sebagaimana dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa secara praktis Partai Keadilan Sejahtera bukan merupakan partai yang lahir sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia. Sebagai partai yang lahir setelah reformasi, Partai Keadilan Sejahtera secara teknis tidak membersamai proses kemerdekaan Indonesia dan perumusan Pancasila. Permasalahan ini lebih lanjut dijelaskan oleh Rokhmad (2014, hlm. 1) yang mengungkapkan bahwa:

sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakan syariat islam. Cita-cita menegakkan syariat islam tersimpan dalam visi, misi dan hati kader PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional. (hlm.1)

Ideologi Partai Keadilan Sejahtera terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Partai Keadilan Sejahtera muncul dengan membawa gagasan dan misi islam yang universal. Machmudi (2005, hlm. 69) menjelaskan kehadiran Ikhwanul Muslimin dalam Partai Keadilan Sejahtera membuat label para pengamat islam dan politik terhadap PKS sebagai kelompok islam fundamentalis. Label tersebut terbentuk mengingat dalam pandangan mereka Ikhwanul Muslimin adalah organisasi islam fundamentalis terlarang di Mesir. Munculnya label pandangan tersebut hadir akibat dari adanya pandangan terhadap Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan politik dan menutup sudut pandang Ikhwanul Muslimin dalam aspek gerakan sosial (*social movement*).

Secara lebih spesifik, inspirasi Ikhwanul Muslimin dalam diri Partai Keadilan Sejahtera dapat disimpulkan melalui dua pendekatan, yaitu inspirasi ideologis berupa *syumuliyatul islam* yang berarti ideologi yang menghendaki keberadaan

islam dalam berbagai kehidupan dan inspirasi historis setelah keruntuhan *khilafah Islamiyah* dan adanya dominasi imperialisme terhadap negara islam. M. Imdadun Rahmat (dalam Sholeh, 2015, hlm. 58) mengatakan bahwa ideologi Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan aktivitas politik sebagai partai pada saat ini berpotensi untuk menimbulkan ketegangan antara umat Islam dengan kekuatan-kekuatan nasionalis. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti meyakini bahwa pembahasan mengenai ideologi Partai Keadilan Sejahtera melalui kajian tentang persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan penting untuk dilaksanakan dalam rangka menelaah secara aktual dan kontekstual dengan pendekatan ilmiah dan objektif.

Pembahasan mengenai Partai Keadilan Sejahtera dan berbagai fenomena yang ada didalamnya menarik untuk dibahas. Machmudi (2005, hlm. 9) menjelaskan berdirinya Partai Keadilan Sejahtera sebagai peristiwa yang unik dan menarik dalam sejarah politik di Indonesia. Menurutnya, ada beberapa pendekatan baru yang membuat kajian mengenai Partai Keadilan Sejahtera menjadi menarik. Pertama, Partai Keadilan Sejahtera mengambil sumber inspirasi ideologinya dari luar negara Indonesia, yakni pemikiran Ikhwanul Muslimin yang bertempat di Mesir sebagai acuan dan inspirasi ideologi. Kedua, Partai Keadilan Sejahtera memiliki proses rekrutmen yang ketat. Ketiga, Partai Keadilan Sejahtera memiliki jaringan sosial yang luas dan efektif. Keempat, Partai Keadilan Sejahtera memandang moralitas kehidupan publik sebagai program utama politik. Hal tersebut menjadikan pembahasan mengenai ideologi Partai Keadilan Sejahtera menarik untuk dibahas.

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, peneliti menelaah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian ini, diantara penelitiannya adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian mengenai Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia terhadap Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera) yang diteliti oleh Widyarsa dan Mohammad Riza (2011). Dalam penelitiannya, Widyarsa berhasil mengungkap pengaruh ideologi islam dari gerakan politik Ikhwanul Muslimin pada PKS. Kedua, penelitian mengenai Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Keterbukaan Ideologi yang dilakukan oleh Nurussa'adah & Sumartias (2017). Penelitian ini mengungkap

tentang keterbukaan ideologi PKS dalam menerima pengaruh dari luar ditinjau dalam studi etnografi. Adapun, melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai Persepsi Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Hubungan Islam dan Kenegaraan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini akan mengkaji mengenai persepsi politik kader PKS terhadap islam, kenegaraan, serta hubungan yang ada didalamnya secara aktual dan objektif. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan persepsi pada kader Partai Keadilan Sejahtera dan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap sikap politik kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mendeskripsikan persepsi politik kader partai sebagai warga negara terhadap hubungan islam dan kenegaraan. Hal tersebut penting untuk ditelaah menelaah urgensi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan agar dapat dilaksanakan secara lebih aktual dan komprehensif pada elemen masyarakat dan sekolah. Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas, peneliti merumuskan judul penelitian skripsi mengenai **“Persepsi Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap Hubungan Islam dan Kenegaraan dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan menelaah latar belakang dan studi literatur penelitian sebelumnya sebagaimana disampaikan pada uraian diatas, penulis membuat rumusan masalah pokok penelitian yaitu “bagaimana persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn?”. Dalam rangka membuat penelitian ini memiliki kajian yang semakin terarah, maka masalah pokok sebagaimana dijelaskan, dioperasionalkan melalui rumusan masalah yang lebih spesifik dengan rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi yang terbentuk pada kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn?

3. Bagaimana pelaksanaan hubungan islam dan kenegaraan ideal di Indonesia menurut persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan persepsi politik kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn.
3. Mengetahui pelaksanaan hubungan islam dan kenegaraan ideal di Indonesia menurut persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini memiliki keterkaitan untuk dapat memperoleh informasi mengenai persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn. Berikut ini akan dijelaskan manfaat dari penelitian ini secara lebih khusus.

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis adalah uraian mengenai implikasi yang menghadirkan kegunaan dan faedah pada ruang lingkup teori. Berikut ini diuraikan secara lebih jelas manfaat teoritis dari penelitian ini.

1. Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat untuk mengungkap interpretasi terhadap persepsi kader partai politik terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam perspektif PKn.
2. Penelitian ini menelaah teori-teori mengenai persepsi politik, faktor yang mempengaruhi persepsi politik, dan kecenderungan perilaku politik kader partai.
3. Dalam konteks ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkaya khasanah keilmuan dari kajian PKn.

4. Sebagaimana dijelaskan oleh Winataputra (dalam Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 97) bahwa paradigma sistemik *citizenship* education diantaranya adalah domain akademik, kurikuler dan sosial kultural. Dalam kajian penelitian ini, bermanfaat dalam mengembangkan konsep kajian Pendidikan Kewarganegaraan pada komunitas keilmuan (akademik) untuk menguraikan konsep PKn, ideologi, partai politik, kenegaraan, dan agama.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk memberikan informasi yang aktual dan objektif mengenai kondisi persepsi politik kader partai. Berikut dijelaskan secara lebih spesifik mengenai manfaat praktis penelitian ini terhadap beberapa pihak.

1. Bagi Mahasiswa

Bagi para mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk meluaskan khasanah ilmu mengenai kondisi kontekstual politik di Indonesia, khususnya mengenai persepsi politik yang terbentuk terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam sudut pandang kader partai.

2. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Bagi departemen pendidikan kewarganegaraan, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian literatur mengenai kondisi politik di Indonesia, khususnya tentang persepsi politik kader partai sebagai elemen warga negara.

3. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan keilmuan, pengembangan kemampuan berpikir secara sistematis, mengkaji dan menganalisa suatu kejadian sosial khususnya fenomena politik di Indonesia.

4. Bagi Partai Keadilan Sejahtera

Bagi Partai Keadilan Sejahtera penelitian ini dapat bermanfaat untuk menelaah situasi dari persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur dan memberikan sumber inspirasi terhadap kajian mengenai persepsi politik bagi peneliti selanjutnya.

### **1.4.3 Segi Kebijakan**

Dalam konteks kebijakan, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dapat menambah wawasan dalam dijadikan sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkaitan untuk dapat mencapai setiap tujuan kebijakannya. Dengan begitu, suatu pengambilan kebijakan akan dilaksanakan dengan semakin memperhatikan kajian terhadap keadaan kontekstual.

### **1.4.4 Segi Isu**

Penelitian ini dapat memberikan fakta yang objektif mengenai kondisi persepsi politik kader partai terhadap hubungan Islam dan kenegaraan ditinjau dalam perspektif PKn. Hal ini dapat menumbuhkan kajian isu yang bersifat berimbang yang didasarkan pada penelitian secara sistematis.

### **1.4.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi, struktur organisasi yang digunakan terdiri menjadi 5 (lima) bagian. Berikut ini akan dijelaskan penjelasan khususnya tentang kajian yang terdapat pada setiap bagian.

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bagian ini, akan ditampilkan latar belakang masalah dalam melaksanakan penelitian, perumusan masalah, tujuan dalam melaksanakan penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian, dan juga struktur organisasi penyusunan skripsi

#### **Bab 2 Kajian Pustaka**

Bagian ini memuat kajian terhadap teori yang berkenaan dengan subjek dan objek dalam penelitian ini. Kajian tersebut membahas pengertian operasional dan keadaan kontekstual terhadap konsep-konsep yang diteliti. Bagian ini membahas juga data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **Bab 3 Metode Penelitian**

Pada bagian ini, diuraikan metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, hingga pembahasan terkait hal-hal yang akan dilaksanakan sebagai metode yang dilaksanakan pada penelitian ini.

#### **Bab 4 Pembahasan**



Hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif. Adapun pembahasan akan memberikan deskripsi mengenai persepsi kader partai keadilan sejahtera terhadap hubungan islam dan kenegaraan ditinjau dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan

### **Bab 5 Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Bagian ini, berisi simpulan, implikasi, saran dan rekomendasi yang muncul setelah melakukan penelitian. Pada bagian ini peneliti menyajikan penafsiran berupa kesimpulan dari hasil penelitian tentang persepsi politik terhadap hubungan islam dan kenegaraan dalam pespektif PKn. Selain itu, bagian ini juga membahas tentang saran dan rekomendasi yang diberikan pada berbagai pihak yang terkait.